

LIBERALISME JOHN LOCKE DAN PENGARUHNYA DALAM TATANAN KEHIDUPAN

Oleh:

Ulfah Nury Batubara¹⁾, Royhanun Siregar²⁾, Nabilah Siregar³⁾

¹⁾Pendidikan Sejarah, IPTS Padangsidimpuan

²⁾PGSD, IPTS Padangsidimpuan

³⁾Pendidikan Biologi, IPTS Padangsidimpuan

¹⁾email : ulfahnury@gmail.com

²⁾email: royhanun28@gmail.com

³⁾email: nabilahsiregar88@gmail.com

Abstrak

Liberalisme adalah paham yang menjunjung kebebasan individu. Pemikiran ini lahir tidak terlepas dari perkembangan mutakhir Barat sejak era *Renaissance/Aufklarung* (zaman pencerahan), sebagai tolak belakang dari zaman *dark ages* (zaman kegelapan). Salah satu tokoh dalam pemikiran ini adalah John Locke. Berkas pengalaman masa lalunya yang hidup saat peperangan antara kaum puritan dengan Raja Charles I, menempa pribadi John Locke akan pentingnya penghargaan kebebasan, demokrasi, pembatasan kekuasaan politik sampai toleransi terhadap perbedaan keyakinan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Penelitian hanya menggambarkan bagaimana pandangan John Locke tentang Liberalisme dan pengaruhnya dalam tatanan kehidupan manusia. Kesimpulan yang bisa ditarik dari penelitian ini yakni paham Liberalisme masih banyak diadopsi oleh masyarakat, padahal tokoh liberal seperti John Locke sudah lama meninggal. Pengaruh Liberalisme dalam bidang politik, lahirnya gagasan nasionalisme dan perubahan format politik maupun kehidupan sosial budaya yang dulunya bersifat kerajaan berubah konsep menjadi negara demokratis. Dalam bidang Ekonomi, kegiatan ekonomi berubah dari pertanian ke industri. Dalam bidang ilmu pengetahuan, kebebasan berfikir dan pengakuan hak-hak individu.

Kata kunci : Liberalisme, John Locke

1. PENDAHULUAN

Liberalisme adalah paham akan kebebasan. Individu diberi kebebasan untuk berkembang tanpa terbatas dalam pemikiran, agama, pers dan politik, tapi kebebasan bagi kaum liberal juga harus tetap dipertanggung jawabkan. Pandangan ini mulai berkembang pada abad 18-19 di Prancis dan Inggris dengan penekanan pada kebebasan Individu untuk mewujudkan kesejahteraan melalui perubahan dan inovasi organisasi sosial. Gerakan kebebasan individu (liberalisme) kemudian menyebar ke berbagai bidang, seperti bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Liberalisme lahir dari sistem kekuasaan sosial berupa sistem merkantilisme, feodalisme, dan gereja roman Katolik. Umumnya liberalisme ingin meminimalkan campur tangan negara dalam kehidupan sosial. Liberalisme sebagai suatu ideologi bisa dikatakan berasal dari falsafah humanisme yang mempersoalkan kekuasaan gereja di zaman *Renaissance* dan juga dari golongan Whings semasa Revolusi Inggris yang menginginkan hak untuk memilih raja dan membatasi kekuasaan raja.

Pengaruh Liberalisme semakin meluas dan mendunia terutama dipenghujung abad ke-20 dengan runtuhnya Komunisme. Keruntuhan ideologi tersebut menempatkan liberalisme sebagai satu-satunya paradigma yang harus “diimani” dan “diamini” seluruh negara, bangsa dan umat manusia. Peradaban dunia seolah harus menerima tegaknya tata nilai

kemanusiaan baru menggantikan nilai-nilai tradisional yang berkembang sebelumnya, dengan liberalisme sebagai pilar utamanya. Contohnya, kawasan Asia dan Amerika Latin yang dulunya berpaham sosialisme, perlahan kini telah mengganti ideologinya menjadi sistem demokrasi liberal. Hal ini tidak terlepas dari percaturan dunia pasca perang dingin, yang dimenangkan negara-negara yang menganut paham Liberal.

Dalam sejarah Indonesia, demokrasi negara ini juga pernah menganut demokrasi Liberal pada masa pemerintahan Soekarno. Walaupun sekarang Indonesia tidak menganut sistem tersebut, tetapi pengaruh dan paham liberal masih bisa dirasakan dalam berbagai aspek. Sehingga mengkaji pemikiran liberalisme masih sangat relevan dan menarik. Hal ini disebabkan paham Liberalisme yang awalnya ingin menyuarakan kebebasan individu telah berdampak pada segala aspek, mulai dari aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya. Tulisan ini akan menyoroati paham liberalisme ala John Locke dan dampaknya pada tata kehidupan masyarakat.

John Locke adalah salah satu tokoh yang menyuarakan paham kebebasan individu (liberalisme). Lahir di Wrington, Inggris pada tanggal 28 Agustus 1632 dan merupakan filsuf pertama yang menghimpun secara terpadu gagasan dasar konstitusi demokratis. Buku pertama John Locke berjudul *An essay Concerning Understanding*

(Esai tentang saling pengertian manusia), yang memuat asal-asul, hakikat dan keterbatasan manusia. Selanjutnya John Locke juga menulis buku untuk menyuarakan pendapatnya dengan judul *A Letter Concerning Toleration* (masalah yang berkaitan dengan toleransi). Buku tersebut menyoroti gagasan John Locke bahwa negara jangan terlalu ikut campur terlampau banyak dalam hal kebebasan menjalankan ibadah menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berkat adanya tulisan-tulisan John Locke, toleransi beragama sudah meluas, bahkan sampai padagolongan-golongan yang tadinya dikucilkan.

Pemikiran John Locke di atas masih relevan dengan kehidupan masa kini kendati John Locke lahir pada abad ke-15 M. Indonesia sebagai salah satu contoh yang beragam penduduknya baik dari suku, agama, ras dan antar golongan patut mendengarkan pemikiran John Locke. Negara tidak boleh untuk mengurus terlampau banyak pilihan rakyat terkait agama, ras, suku dan golongan. Negara cukup memfasilitasi dan memberi kebebasan pada rakyat terkait dengan pilihannya. John Locke dengan paham kebebasannya sudah meluas pada berbagai bidang. Inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam pemikiran kebebasan (liberalisme) ala John Locke dan dampaknya dalam tatanan kehidupan masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian adalah cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data dan tujuan tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian deskriptif. Menurut Sudjana penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Ciri pokok dari penelitian deskriptif yakni : (1) memusatkan perhatian pada masalah saat penelitian di lakukan atau masalah bersifat aktual. (2) menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya dengan diiringi interpretasi rasional. Adapun yang menjadi landasan peneliti menggunakan metode deskriptif adalah:

- a. Penelitian ini mengungkapkan masalah aktual yang terjadi sekarang. Pada penelitian ini peneliti ingin membahas paham liberal yang masih banyak diadopsi oleh masyarakat.
- b. Metode ini selain dapat mengumpumpulkan data, menyusun data, menginterpretasikan data serta datanya juga dapat disimpulkan.
- c. Penggunaan metode ini memberikan gambaran tentang alasan mengapa masih banyak masyarakat menganut paham liberal padahal tokoh Liberal seperti John Locke sudah wafat beberapa abad yang lalu.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Liberalisme

Secara harfiah liberal (dalam bahasa Inggris) berarti "bebas". Paham liberalisme muncul ketika

Eropa memasuki abad Renaisans, yakni masa dimana gereja tidak lagi mengekang kehidupan manusia. Liberalisme merupakan aliran pemikiran yang berorientasi pada kebebasan individu, menghormati kemerdekaan setiap orang, meyakini bahwa tugas pokok negara adalah melindungi kebebasan warganya seperti kebebasan berfikir, berekspresi dan kepemilikan. Aliran ini memandang bahwa manusia dengan seluruh akal nya mampu memahami segala sesuatu. Dengan kata lain aliran ini dibangun di atas prinsip sekuler yang mengangungkan kemanusiaan dan berpandangan bahwa manusia dapat dengan sendirinya mengetahui segala kebutuhan hidupnya.

Selain itu beberapa tokoh juga memberikan pengertian tentang liberalisme. Pertama, liberalisme dalam artian Dunne sebagai sebuah ideologi yang menjunjung tinggi kebebasan individu. Definisi liberalisme juga diartikan sebagai sebuah teori dari pemerintah, yang berusaha untuk memberikan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat tertentu. Lebih lanjut, Jackson and Sorensen (1999) menyatakan bahwa liberalisme adalah suatu perspektif yang memiliki pandangan positif tentang sifat manusia. Clark (1989) dalam Dunne (2001) mengatakan bahwa liberalisme dikenal sebagai paham optimisme. Semenata itu, Wardhani (2014) dalam penjelasannya menyatakan bahwa liberalisme adalah perspektif dalam hubungan internasional yang berfokus pada permasalahan *international peace* dan *human rights*. Tokoh dari liberalisme ini antara lain Woodrow Wilson, John Locke dan Norman Angell.

Sementara itu, Mises juga menegaskan bahwa liberalisme adalah doktrin tentang kebebasan yang merata dan kesempatan yang setara untuk setiap individu tanpa pengaturan, kontrol dan regulasi dari negara. Liberalisme juga berurusan dengan aktivitas manusia menyangkut soal kesejahteraan material (berbeda dengan agama). Dalam pandangan Mises, setiap individu menyerupai sosok Robinson Crusoe yang kecenderungan utamanya hanya memaksimalkan kepentingan diri, dan bertanggung jawab hanya pada dirinya serta bergantung pada dirinya sendiri. Tapi pada saat yang sama, si Robinson Crusoe juga menyadari bahwa meski keinginan dan kebutuhannya tak terbatas, lingkungan, waktu dan alam tempat dia hidup sangat terbatas. Karena itu, ia mesti melakukan pilihan, menimbang secara rasional alternatif-alternatif yang ada. Selain itu, si Robinson Crusoe juga menyadari bahwa mengingat sumber daya dan kemampuan manusia tidak sama dan tidak terdistribusi secara sama pula, maka pembagian kerja (*division of labor*) menjadi hal yang niscaya untuk meningkatkan produktivitas.

Dari beberapa pendapat tokoh-tokoh di atas dapat disimpulkan bahwa liberalisme adalah paham akan kebebasan. Individu diberi kebebasan untuk berkembang tanpa terbatas dalam pemikiran, agama, pers dan politik. Tapi kebebasan bagi kaum liberal juga harus tetap dipertanggung jawabkan. Di

samping itu, liberalisme juga membawa dampak yang besar bagi sistem masyarakat Barat, diantaranya adalah mengesampingkan hak Tuhan dan setiap kekuasaan yang berasal dari Tuhan. Pemindahan agama dari ruang publik menjadi sekedar urusan individu (ceremonial dan ritual). Pengabaian total terhadap agama Kristen dan gereja atas statusnya sebagai lembaga publik, lembaga legal dan lembaga sosial. Adapun ciri-ciri liberalisme secara konkrit adalah :

- 1) Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang lebih baik.
- 2) Setiap anggota masyarakat mempunyai kebebasan intelektual penuh, termasuk kebebasan dalam berbicara, beragama serta kebebasan pers.
- 3) Pemerintah hanya mengatur kehidupan masyarakat secara terbatas
- 4) Kekuasaan dari seseorang terhadap orang lain merupakan hal yang buruk. Oleh karenanya, kekuasaan harus dicurigai, dibatasi, dan diawasi karena cenderung disalahgunakan. Sehingga, pemerintah harus dijalankan sedemikian rupa serta dan penyalahgunaan dapat dicegah.
- 5) Masyarakat dapat dikatakan bahagia manakala individu-individu didalamnya bahagia.

Selain ciri-ciri di atas, liberalisme juga memiliki enam prinsip dasar. Keenam prinsip tersebut adalah :

- a) *Individualisme*, kaum liberal percaya bahwa individu adalah sesuatu yang sangat penting. Seluruh kebijakan liberal mengarah dalam memberikan ruang kebebasan dan hak-hak individu. Bagi kaum liberal, individualisme lebih penting dari kolektivisme.
- b) *Rasionalisme*, kaum liberal percaya bahwa dunia memiliki struktur yang rasional dan dapat dipahami secara logis. Keteraturan dunia bisa dipahami lewat deliberasi pikiran (pikiran mendalam) dan pencarian kritis secara terus-menerus.
- c) *Kebebasan*, Tak ada slogan yang lebih penting bagi kaum liberal selain kebebasan. Kebebasan adalah kemampuan untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan mata hati. Seluruh filosof liberalisme berangkat dari kebebasan manusia.
- d) *Tanggung jawab*, kebebasan tanpa tanggung jawab adalah keliaran. Orang seringkali memahami liberalisme sebagai liarisme. Liberalisme adalah paham akan kebebasan dan tanggung jawab.
- e) *Keadilan*, kaum liberal percaya bahwa keadilan adalah nilai moral yang harus dijunjung tinggi. Keadilan bukan berarti mengorbankan hak seseorang demi membela hak yang lainnya. Keadilan adalah pemberian kesempatan kepada setiap individu untuk bersaing dan menggapai hak-haknya
- f). *Toleransi*, adalah sikap menerima atau menghormati pandangan atau tindakan orang

lain, sekalipun pandangan atau tindakan itu belum tentu disetujuinya. Toleransi adalah dasar bagi kebersamaan dan kerukunan hidup. Tanpa toleransi, kebebasan tidak dapat ditegakkan.

Sejarah Munculnya Paham Liberalisme

Sejarah liberalisme dimulai dari zaman Renaissance, sebagai reaksi atas hegemoni kaum feodal pada abad pertengahan di Eropa. Saat itu kekuasaan gereja mendominasi seluruh aspek kehidupan manusia. Semua aturan kehidupan ditentukan dan berada di bawah otonomi gereja. Hasilnya, manusia tidak memiliki kebebasan dalam bertindak, otonomi individu dibatasi dan bahkan ditiadakan. Kondisi ini memicu kritik dari berbagai kalangan, yang menginginkan otonomi individu dalam setiap tindakan dan pilihan hidup. Menurut liberalisme, individu adalah pencipta dan penentu tindakannya. Dengan konsep seperti ini, maka kesuksesan dan kegagalan seseorang ditentukan oleh dirinya sendiri, oleh tindakan-tindakannya dan pilihan-pilihan terhadap tindakan tersebut. Intinya, manusia memiliki kebebasan dalam hidupnya, manusia adalah pribadi yang otonom.

Pemikiran liberal mempunyai akar sejarah sangat panjang dalam sejarah peradaban Barat yang Kristen. Pada tiga abad pertama Masehi, agama Kristen mengalami penindasan di bawah Imperium Romawi sejak berkuasanya Kaisar Nero (tahun 65). Kaisar Nero bahkan memproklamirkan agama Kristen sebagai suatu kejahatan. Menurut Abdulah Nashih Ulwan, pada era awal ini pengamalan agama Kristen sejalan dengan Injil Matius yang menyatakan, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar dan berikanlah kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan." (Matius, 22:21).

Namun kondisi tersebut berubah pada tahun 313, ketika Kaisar Konstantin (w.337) mengeluarkan dekret *Edict of Milan* untuk melindungi agama Nasrani. Selanjutnya pada tahun 392 keluar *Edict of Theodosius* yang menjadikan agama Nasrani sebagai agama negara (*state-religion*) bagi Imperium Romawi. Artinya kaisar mengeluarkan aturan yang mengharuskan semua penduduk di wilayah kekaisaran untuk mengikrarkan iman kristen melalui gereja-gereja resmi negara. Pada tahun 476 Kerajaan Romawi Barat runtuh dan dimulailah Abad Pertengahan (*Medieval Ages*) atau Abad Kegelapan (*Dark Ages*). Sejak itu Gereja Kristen mulai menjadi institusi dominan. Dengan disusunnya sistem kepausan (*papacy power*) oleh Gregory I (540-609 M), Paus pun dijadikan sumber kekuasaan agama dan kekuasaan dunia dengan otoritas mutlak tanpa batas dalam seluruh sendi kehidupan, khususnya aspek politik, sosial, dan pemikiran.

Abad Pertengahan itu ternyata penuh dengan penyimpangan dan penindasan oleh kolaborasi Gereja dan raja/kaisar, seperti kemandegan ilmu pengetahuan dan merajalelanya surat pengampunan dosa. Akibat tindakan gereja, raja dan kaum feodal, rakyat pun melakukan perlawanan. Mereka menuntut

kebebasan, persamaan, dan keadilan (*liberty, fraternity, dan equality*) sebuah semboyan yang dikumandangkan dalam revolusi Prancis. Semboyan tersebut melahirkan *liberalisme* dalam lapangan politik, *kapitalisme* dalam lapangan ekonomi, *hedonisme* dalam lapangan sosial kebudayaan, dan *free value* dalam lapangan ilmu pengetahuan.

Maka Abad Pertengahan pun meredup dengan adanya upaya koreksi atas Gereja yang disebut gerakan Reformasi Gereja (1294-1517), dengan tokohnya semisal Marthin Luther (w. 1546). Ia mengajarkan bahwa manusia mendapatkan keselamatan kekal berdasarkan imannya dan bukan karena tindakan gereja seperti sakramen dan indulgensi (penebusan dosa). Tokoh lainnya adalah Jean Calvin (w. 1564), yang menyatakan bahwa gereja telah diajarkan selamat atau tidaknya manusia sudah ditentukan oleh Tuhan (ajaran predestinasi). Ia juga menyatakan bahwa keberhasilan dibidang ekonomi dapat dijadikan penanda bagi keselamatan seseorang di akhirat, karena keberhasilan ekonomi tersebut menandakan cinta Tuhan kepada yang bersangkutan.

Gerakan ini disertai dengan munculnya para pemikir Renaissans pada abad XVI seperti Machiaveli (w. 1528) dan Michael Montaigne (w. 1592), yang menentang dominasi Gereja, menghendaki disingkirkannya agama dari kehidupan, dan menuntut kebebasan. Selanjutnya pada era Pencerahan (*Enlightenment*) abad XVII-XVIII, seruan untuk memisahkan agama dari kehidupan semakin mengkristal dengan tokohnya Montesquieu (w. 1755), Voltaire (w. 1778), dan Rousseau (1778). Puncak penentangan terhadap Gereja ini adalah Revolusi Perancis tahun 1789 yang secara total akhirnya memisahkan Gereja dari masyarakat, negara, dan politik. Sejak itulah lahir sekularisme-liberalisme yang menjadi dasar bagi seluruh konsep ideologi dan peradaban Barat.

Liberalisme Ala John Locke

John Locke dilahirkan di Wrington, Inggris pada 28 Agustus 1632. Ia lahir dalam keadaan tragis sebab masa itu, negara Eropa abad XVII dilanda perang saudara dan perang agama antara kaum Katolik dengan Protestan. Keadaan inilah yang memberi pengalaman dan sumbangsih pemikiran bagi Locke yakni pentingnya penghargaan akan kebebasan, demokrasi, pembatasan kekuasaan politik serta toleransi terhadap keyakinan agama. Disamping itu, ia juga mendapat pendidikan dengan haluan politik Royalis, musuh dari kaum Puritan yang banyak mendapat simpatik kalangan muda. Perpaduan ajaran Calvins (Puritan) dengan pengaruh pendidikan Royalis melalui sosialisasi keluarga dan lingkungan sosial telah menjadikannya mengambil manfaat dari kedua hal tersebut. Pada usia 20 tahun, Locke memasuki Universitas Oxford dan berkenalan dengan Edward Bagshawe yang aktif mempropagandakan toleransi agama, kebebasan

politik serta hak-hak alamiah, suatu gagasan yang menjadi keyakinan dalam pemikirannya.

Buku pertama yang membuat Locke terkenal adalah *An Essay Concerning Human Understanding* (esai tentang saling pengetahuan antar manusia) yang terbit tahun 1690. Selain buku tersebut, bukunya *A letter Concerning Toleration* (masalah yang berkaitan dengan toleransi) terbit pada tahun 1689. Dalam bukunya Locke menekankan bahwa negara jangan ikut campur terlampau banyak dalam hal kebebasan menjalankan ibadah menurut kepercayaan dan agama masing-masing individu. Lebih dari itu, Locke mengembangkan prinsip toleransi kepada golongan non-kristen, baik penganut kepercayaan primitif, Islam, maupun Yahudi tidak boleh dikurangi hak sipilnya dalam negara semata-mata atas pertimbangan agama. Berkat adanya tulisan-tulisan Locke, toleransi beragama sudah meluas, bahkan sampai pada golongan-golongan yang tadinya dikucilkan.

Selanjutnya ditegaskan Locke bahwa hak alami memiliki kandungan yang sangat terbatas. Pertama, manusia memiliki hak untuk hidup. Hak itu berupa hak kepemilikan, yaitu bahwa seseorang memiliki tubuhnya sendiri. Hak untuk hidup ini tidak bisa dihilangkan atau dijual kepada siapa pun ataupun diambil dari orang lain. Kedua, manusia mempunyai hak untuk atas hasil kerjanya sendiri. Jika seseorang telah mengambil bagiannya dari alam, maka orang lain punya kewajiban untuk tidak menggangukannya. Berbeda dengan pandangan Hobbes yang memandang "lingkungan alami" adalah suasana perang, Locke memandang "lingkungan alami" sebagai suatu keadaan yang diliputi suasana kedamaian. Dengan demikian, lembaga-lembaga seperti negara dan sistem legal diperlukan untuk beberapa orang bodoh yang memaksakan kehendaknya atau menambah hak alamiahnya dengan merampas kehidupan dan hak milik orang lain.

Peran penting Locke lainnya ditunjukkan melalui bukunya yang berjudul *Two Treatises of Government* (dua kesepakatan dengan pemerintah) pada tahun 1689 yang berisi penyuguhan ide dasar yang menekankan arti penting konstitusi demokrasi liberal. Locke yakin bahwa setiap manusia memiliki hak alamiah, dan ini bukan sekedar menyangkut hidup, tetapi juga kebebasan pribadi serta hak atas pemilikan sesuatu. Tugas utama pemerintah adalah melindungi penduduk dan hak milik warga negaranya. Locke juga menolak anggapan hak suci raja, dan menekankan bahwa pemerintah baru dapat menjalankan kekuasaannya atas persetujuan yang diperintah. Kemerdekaan pribadi dalam masyarakat berada di bawah kekuasaan legislatif yang disepakati dalam suatu negara. Selanjutnya Locke juga mengemukakan perlunya pemisahan kekuasaan, dan kekuasaan legislatif harus lebih unggul dibanding kekuasaan eksekutif dan yudikatif. Berangkat dari pandangan ini bagi Locke, negara merupakan abdi

rakyat, dimana layanan utama yang diharapkan dari negara adalah melindungi rakyat dan hak miliknya.

Pengaruh Liberalisme Dalam Tatanan Kehidupan

1) Bidang Politik

Bersumber pada pemikiran politik John Locke (1632-1704) yang mengemukakan bahwa manusia itu dijamin oleh konstitusi dan dilindungi pemerintah. Sehingga pemerintah harus memakai sistem perwakilan, atau yang disebut dengan demokratis. Sistem politik liberal ini sangat mempengaruhi bentuk negara di Eropa barat pada awalnya, berkembang pasca-kolonialis dunia Barat terhadap dunia ketiga, yakni kawasan Asia, Amerika Latin, dan Afrika.

Dengan menganut paham liberal, negara-negara kerajaan yang bersifat feodal dan bertumpu pada kesetiaan raja dan keluarganya telah berubah. Paham liberal telah melahirkan negara yang demokratis dengan semangat bertumpu pada nasionalisme yang menekankan persamaan, persaudaraan dan keadilan. Contoh negara tersebut seperti Prancis, Inggris, Jerman, Italia dan lainnya. Sistem politik dari negara-negara ini tidak lagi terpusat kepada gereja (Paus) di Roma. Negara dengan sendirinya menjadi kekuatan yang terbesar, tertinggi dan otonom yang terinspirasi oleh rasa kebangsaan dan bukan lagi membangun "kerajaan Tuhan di Bumi". Oleh sebab itu, bentuk negara dibedakan dalam dua macam, yakni negara dalam bentuk Republik dan kerajaan.

Adapun negara yang bentuknya monarki absolut bergeser menjadi monarki konstitusional atau monarki parlementer, seperti Inggris, Belanda, Belgia dan Spanyol. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa pada awalnya suara raja dan suara Paus adalah suara Tuhan, setelah pengaruh Liberalisme melanda Eropa, kekuatan suara ada di tangan setiap warga. Dengan demikian suara rakyat adalah suara Tuhan (*Fox dei-Fox popule*).

2) Bidang Ekonomi

Paham liberal juga masuk pada bidang ekonomi. Tokoh yang terkenal adalah Adam Smith. Sistem ekonomi liberal adalah sistem ekonomi dimana sebagian besar keputusan dalam perekonomian ditentukan oleh masing-masing individu, bukan lembaga atau organisasi bahkan pemerintah. Ekonomi liberal sering dikaitkan dengan dukungan terhadap pasar bebas dan kepemilikan pribadi atas aset dan modal. Proteksionisme bertentangan dengan ekonomi liberal karena dianggap tidak mendukung perdagangan bebas dan pasar terbuka. Secara historis, ekonomi liberal muncul sebagai tanggapan akan merkantilisme dan feodalisme. Ekonomi liberal juga dianggap bertentangan dengan ekonomi non-kapitalis, seperti sosialisme dan ekonomi terencana.

Teori yang dikemukakan oleh Adam Smith ini menganjurkan agar pemerintah tidak terlalu mengintervensi pasar. Smith berpendapat bahwa jika semua orang dibiarkan melakukan kegiatan

ekonominya sendiri dan bukan dikendalikan oleh negara, maka hasilnya akan menjadi harmonis dan lebih bermasyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan. Ekonomi liberal menentang intervensi pemerintah dengan alasan bahwa negara sering berfungsi sebagai tempat untuk mewedahi kepentingan bisnis dengan mendistorsi pasar untuk menguntungkan pihak tertentu. Dengan demikian, hasil yang didapatkan oleh rakyat menjadi tidak maksimal. Penganut paham ekonomi liberal beranggapan bahwa jika individu maju, secara otomatis masyarakat juga akan maju. Dari sini timbul semangat dalam mengumpulkan modal (*capital*) secara besar-besaran untuk mempertahankan serta membangun industri yang besar, perdagangan dengan pemasaran yang ekspansif. Adapun ciri-ciri sistem ekonomi liberal diantaranya :

- 1) Semua sumber produksi adalah milik masyarakat secara individu.
- 2) Diakuinya kebebasan pihak swasta/masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan ekonomi.
- 3) Setiap orang bebas memiliki barang (hak milik diakui), termasuk barang modal.
- 4) Harga barang ditentukan oleh mekanisme pasar.
- 5) Motif utama adalah mencari laba yang terpusat pada kepentingan individu.
- 6) Pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi.
- 7) Menerapkan sistem persaingan bebas.

Cara pandang ini menjiwai orang-orang di Barat. Paham liberal seolah-olah membatasi ruang gerak dan peran dari negara. Negara tidak boleh mencampuri kebebasan individu, kecuali tindakan individu itu telah melanggar hak-hak orang lain. Sikap negara dalam konteks ini "pasif" sehingga ada ungkapan yang mengatakan bahwa "pemerintah yang paling sedikit adalah pemerintah yang baik (*the least government is the best government*). Semoyan ini sering juga disebut, negara hanya berperan sebagai "penjaga malam (*Nacht wachters staat*). Untuk pandangan di bidang ekonomi liberal memiliki prinsip *laissez faire laissez aller*, yang artinya biarlah manusia mengurus ekonominya sendiri-sendiri, maka ekonomi seluruh negara akan kuat dan negara akan makmur.

3). Bidang Pendidikan

Dunia pendidikan yang memiliki posisi strategis dalam struktur kebudayaan setiap bangsa juga tidak luput dari keharusan menyesuaikan diri dengan tuntutan liberalisasi. Pengaruh tersebut dalam pendidikan di Barat tampak pada paradigma pendidikan progresifisme, yang memandang setiap individu sebagai pihak paling tahu yang terbaik bagi dirinya sendiri. Sekolah ataupun guru tidak berhak menentukan tata nilai yang harus dan tidak semestinya bagi siswa-siswanya.

Pendidikan semakin jauh melepaskan tanggungjawabnya terhadap kelangsungan tata nilai keagamaan dan tradisi, dikarenakan setiap individu diberi kesempatan untuk menentukan tata nilai bagi

dirinya sendiri. Dimensi moralitas pendidikan bukan diarahkan dalam rangka pengabdian kepada Tuhan atau hal-hal yang berdimensi eskatologis. Moralitas pendidikan lebih ditekankan pada kepentingan manusia sebagai individu. Hal ini selaras dengan berkembangnya pola pikir pragmatis-utilitarianis Amerika sebagaimana dikonstruksikan Sanders Piers ataupun John Stuart Mill. Implikasi pandangan ini terhadap pendidikan tentu sangat luas, mulai dari segi tujuan pendidikan, bahan atau materi yang harus diajarkan, metode dan pendekatan pembelajaran serta bagaimana proses pendidikan harus dievaluasi. Singkatnya, pandangan ini mendasari seluruh aspek dalam penentuan kurikulum pendidikan sebagai implikasi operasionalnya.

Tujuan pendidikan tidak lagi dapat ditekankan pada kepentingan penyelenggara dalam menebarkan misinya di tengah masyarakat. Sebaliknya, pendidikan dituntut mempertimbangkan posisi dirinya sebagai fasilitator masyarakat dalam mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memperkembangkan diri. Seiring menguatnya paradigma liberalis-kapitalis, pendidikan yang semula menjadi wahana pewarisan budaya bergeser menjadi agen kapital. Pendidikan secara simultan beralih posisi sebagai penopang industri. Keberadaan industri seakan menjadi jalan akhir bagi proses pendidikan dengan arah, target serta *reward* yang secara material semakin kongkrit.

Formalisasi pendidikan mengambil bentuk sertifikasi keilmuan dan keahlian yang sepenuhnya menjadi otoritas lembaga pendidikan. Kebutuhan akan tenaga-tenaga ahli dan ilmuwan menempatkan lembaga pendidikan memiliki peran mencetak tenaga-tenaga yang secara spesifik dibekali keahlian dan keilmuan tertentu dengan menempuh pengalaman belajar pada suatu jenjang dan tingkatan pendidikan. Materi pendidikan tidak lagi menekankan dimensi etis-dan moral semata, bahkan semakin mundur, digantikan dengan hal-hal yang terkait dengan kebutuhan masyarakat dan kepentingan pengembangan hidup. Pendidikan modern telah memungkinkan banyak aspek yang sebelumnya kurang diberikan perhatian justru menjadi orientasi dominan. Modernitas pendidikan yang berpijak pada pandangan liberal telah banyak membebaskan masyarakat bangsa dari keterbelakangan.

Meski tidak sepesat perkembangan pada bangsa Barat, kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas menjadi tuntutan yang tidak dapat ditolak. Liberalisasi pendidikan rupanya juga berdampak pada munculnya situasi dehumanisasi. Liberalisme yang semula berangkat dari kesadaran humanisme justru berujung pada dehumanisasi. Situasi ini disebabkan adanya kecenderungan yang menempatkan pendidikan sebagai penopang perputaran modal. Akibatnya, setiap individu semakin kehilangan eksistensinya, mengingat keberadaan mereka dan dunia pendidikan pendidikan

lebih banyak tertuju pada kepentingan memenuhi komponen produksi.

Konsep pendidikan dalam tradisi liberal berakar pada cita-cita Barat tentang Individualisme. Kaitannya dengan sekolah, pendidikan liberal menganggap tujuan sekolah menyediakan informasi dan keterampilan yang diperlukan oleh siswa supaya belajar sendiri secara efektif. Sekolah mengajar siswa bagaimana menyelesaikan masalah praktis melalui penerapan tata cara penyelesaian masalah secara perseorangan maupun kelompok berdasarkan metode-metode ilmiah rasional. Jadi pengetahuan adalah alat yang diperlukan untuk pemecahan masalah praktis.

4. KESIMPULAN

Liberalisme adalah paham akan kebebasan. Individu diberi kebebasan untuk berkembang tanpa terbatas dalam pemikiran, agama, pers dan politik. Tapi kebebasan bagi kaum liberal juga harus tetap dipertanggung jawabkan. Di samping itu, liberalisme juga membawa dampak yang besar bagi sistem masyarakat Barat, diantaranya adalah mengesampingkan hak Tuhan dan setiap kekuasaan yang berasal dari Tuhan. John Locke adalah Salah satu tokoh Liberalisme yang menyuaran, individu harus bebas tanpa ada intervensi dari pihak manapun.

Dampak liberalisme dalam bidang politik, lahirnya gagasan nasionalisme dan perubahan format politik maupun kehidupan sosial budaya yang dulunya bersifat kerajaan berubah konsep menjadi negara demokratis. Dibidang ekonomi, lahir perubahan kegiatan ekonomi masyarakat yang berorientasi pertanian ke industri, tetapi yang berubah adalah alat-alat produksi sementara pola hubungan antar pemilik modal dan pekerja tetap terjadi eksploitasi. Jika masa feodal hubungan antara pemilik tanah (kaum feodal) dengan petani, masa industri hubungan antara kapital sebagai pemilik modal dengan buruhnya. Liberalisme juga berpengaruh dalam bidang ilmu pengetahuan. Kebebasan berfikir dan pengakuan hak-hak individu telah mendorong lahirnya kreativitas dan penemuan-penemuan baru. Seperti mesin uap yang ditemukan oleh James Watt, lampu oleh Thomas Alfa Edison dan sebagainya.

Adapun ciri-ciri liberalisme secara konkrit adalah :

- a) Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang lebih baik
- b) Setiap anggota masyarakat mempunyai kebebasan intelektual penuh, termasuk kebebasan dalam berbicara, beragama serta kebebasan pers
- c) Pemerintah hanya mengatur kehidupan masyarakat secara terbatas
- d) Kekuasaan dari seseorang terhadap orang lain merupakan hal yang buruk. Oleh karenanya, kekuasaan harus dicurigai, dibatasi, dan diawasi karena cenderung disalahgunakan. Sehingga,

- pemerintah harus dijalankan sedemikian rupa serta dan penyalahgunaan dapat dicegah.
e) Masyarakat dapat dikatakan bahagia manakala individu-individu didalamnya bahagia.

5. REFERENSI

- Ajat Sudrajat. "One The Move to The New Era Renaisans dan Eksplorasi Samudra". Repository. UNY.ac.id
- Ajat Sudrajat. 2015. *Sejarah Pemikiran Dunia Islam dan Barat*. Malang: Intrans Publishing
- Alia Azmi. 2013. "Individualisme Dan Liberalisme Dalam Sekularisme Media Amerika". *Jurnal Humans*.Vol. XII No.1 Th. 2013. FIS Universitas Negeri Padang
- Anton M Moeliono dkk. 1990 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Arif Rohman. 2009. *Politik Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta : Laksbang Mediatama
- Desak Putu Sinta Suryani. Refleksi Mazhab Inggris dalam Teori Hubungan Internasional: Globalisasi dan Jembatan Via Media. *Jurnal Hubungan Internasional Tahun VII, No.1, Januari-Juni 2014*.
- Detmar Doering. "Liberalisme". Files.wordpress.com/2013/09/detmar-doering-ed-liberalisme.pdf. hal : 77. Diakses pada 27 Maret 2018 pukul 20.00 WIB
- Firdaus Syam. 2007. *Pemikiran Politik Barat (sejarah, filsafat, ideologi, dan pengaruhnya terhadap dunia ketiga)*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Henry J Schmandt. 2002 *Filsafat Politik Kajian Historis Dari Zaman Yunanai Kuno Sampai Zaman Modren*. Penerjemah Ahmad Baidlowi & Imam Bahehaqi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Heru Nugroho. 2000. "Tinjauan Kritis Liberalisme dan Sosialisme". *Jurnal Ilmiah Bestari*. No.30 Th.XIII. Diakses pada 27 Maret 2018. Pukul 20.00 WIB
- [Http://www.insistnet.com](http://www.insistnet.com) - INSISTS - Institute for The Study of Islamic Thought and PCoivwileizreadtio bny Mambo Generated: 12 November, 2007. Diakses pada 27 Maret 2018. Pukul 21.00 WIB.
- Husaini, Adian. 2005. *Wajah Peradaban Barat dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Sekular-Liberal*. Jakarta : Gema Insani Press
- Idris, Ahmad. 1991. *Sejarah Injil dan Gereja (Tarikh Al-Injil wa Al-Kanisah)*. Penerjemah H. Salim Basyarahil. Jakarta : Gema Insani Press.
- Lasa, HS. 2009. *Kamus Kepustakawan Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisier
- Ludwig Von Mises. 1985 *Menemukan Kembali Liberalisme*. Penerjemah Lela E. Madjiah. Jakarta: Freedom Institute. Hal : X-XI
- Moch. Tolchah. Pendidikan dan Faham Liberalisme. *Jurnal At-Ta'dib* Vol.3 No.2 Sya'ban 1428. IAIN Sunan Ampel Surabaya.
- Nawawi, H. Hadari. 1983. *Metode Penelitian Deskriptif*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta
- Nurani Soyomukti. 2013. *Teori-teori pendidikan (Tradisional, Neo liberalisme, Marxis-Sosialis, Postmodren*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media
- Soekarno. 1965. *Di Bawah Bendera Revolusi Jilid I*. Jakarta : panitia Penerbit DBR
- Sudjana. 2001. *Metode & Teknik Pembelajaran Partisipatif*. Bandung : Falah Production
- Supriyanto. "Memahami Cara Bekerja Sistem Perekonomian. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*". Volume 6 Nomor 2, November 2009 FISE-Universitas Negeri Yogyakarta.
- Ulwan, Abdullah Nashih. 1996. *Islam Syariat Abadi (Al-Islam Syar'ah Az-Zaman wa Al-Makan)*, Penerjemah Jamaludin Saiz. Jakarta : Gema Insani Press
- Wahyu Mutingningsih. 2014. *Para Filsuf Dari Plato Sampai Ibnu Bajjah*. Yogyakarta : IRCiSoD
- Wardhani, Baiq, 2014. *Week 3. Liberalisme*. Materi disampaikan pada kuliah teori hubungan internasional, departemen hubungan internasional, Universitas Airlangga. 20 Maret 2014